

Analisis formulasi kebijakan alternatif skema kontrak sektor hulu minyak dan gas bumi non konvensional dalam rangka menarik kontraktor minyak dan gas bumi non konvensional = Analytical formulation of alternatives policy for contract scheme unconventional hydrocarbon upstream sector for the purpose to improve attractiveness unconventional hydrocarbon contractor

Julia Riannisa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431970&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini mengenai proses formulasi kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi non konvensional dalam rangka menarik kontraktor minyak dan gas bumi non konvensional dan hambatan dalam penerapan kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses formulasi kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi non konvensional belum sepenuhnya mengikuti model rasional Patton dan Savicky dan beberapa hal yang belum diatur membuat kebijakan alternatif skema kontrak dalam Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2015 terhambat untuk diterapkan. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap kebijakan alternatif skema kontrak tersebut sangat positif. Akan tetapi, pemerintah perlu menetapkan aturan pelaksana dari kebijakan tersebut.

<hr>

#### <b>ABSTRACT</b><br>

The issues are about formulation process of Contract Scheme Alternatives Policy for Unconventional Hydrocarbon for The Purpose to Improve Attractiveness Unconventional Hydrocarbon Contractor and Obstacles to Implement Contract Scheme Alternatives. The research approach is qualitative. The result showed that in formulation process of Contract Scheme Alternatives Policy is not entirely follows rational model of Patton and Savicky dan several things yet regulated makes contract scheme alternatives in Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources Number 38 Year 2015 difficult to implement. Response from industrial existing is positive. However, the government needs to regulate technical rules from policy.